PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2026

ALAMAT :
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 8
Kec./Kab. Pacitan, Jatim 63512, Indonesia

EMAIL :
kominfo@pacitankab.go.id

TELP :
Phone: 0357-882114

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jln.Jaksa Agung Suprapto No. 08 Pacitan 63512 No. Telp : (0357) 882114
e-Mail : kominfo@pacitankab.go.id, Website : www.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Nomor : 000.7.2.4/ 2022 /408.41/2026

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2026 dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahu 2020 tentang Cipta Kerja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan, sebagaimana Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026 adalah merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan Tahun 2026.

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah dokumen rancangan perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Sistematika Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 Kabupaten Pacitan disusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kominfo Tahun Lalu
Bab III : Tujuan dan Sasaran Dinas Kominfo
Bab IV : Rencana Kerja Tahun 2026
Bab V : Penutup

KELIMA : Rencana Kerja Perubahan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan ini menjadi rujukan dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan bagi Dinas Kominfo Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi perubahan pada lingkup strategis, dapat dilakukan perubahan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal: 21 Agustus 2026

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

DODIK SOEMARSONO, AP.M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 197610151996021002

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Nomor : 000.7.2.4/2022/408.41/2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud danTujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 6
BAB 2 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 8
2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 8
BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .. 20
3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika 20
BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25
4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 25
BAB 5 PENUTUP 35

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 Reallisasi Anggaran s/d Triwulan II 8

Tabel 2.1.2 Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pacitan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 13

Tabel3.1.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 21

Tabel 3.1.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan..... 24

Tabel 4.1 Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas, dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
4. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam perubahan RKPD

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2026 adalah dokumen peencanaan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan yang merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Dokumen ini diperlukan untuk mengakselerasi capaian sasaran pembangunan

urusan Komunikasi dan Informatika,Statistik serta Persandian selama tahun 2026 dalam bentuk penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 ;
28. Peraturan Bupati No 74 Tahun 2023 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Pacitan;
29. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
30. SE Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA.2025;
31. Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian terhadap rencana kerja tahun berjalan yang telah ditetapkan, dengan mengakomodir dinamika kebijakan terbaru, perubahan kondisi actual, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta memperhatikan ketersediaan sumber daya, baik

dan aspek pendanaan, sumber daya manusia maupun kapasitas pelaksanaannya. Proses ini bertujuan untuk perubahan yang terjadi, serta selaras dengan arah Pembangunan.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 adalah :

a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta program kegiatan yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2026;
b. Penyusunan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) serta perubahan Lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
c. Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
d. Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah..

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026, meliputi:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat/menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Bab ini memuat evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PD

Bab ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rencana kerja beserta pendanaan program,kegiatan dan sub kegiatan Dinas Komunikasi dan Inormatika Kabupaten Pacitan.

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2026

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan melaksanakan 3 (tiga) urusan yaitu urusan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Dalam tugas pokok dan fungsi sesuai urusan tersebut telah ditetapkan indikator untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan .

Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang dan 7 (tujuh) Kegiatan yang merupakan program pada Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk program wajib pilihan terdiri dari 4 (empat) Program dan 5 (lima) kegiatan. Program wajib pilihan merupakan program dan kegiatan yang berada pada bidang – bidang Dinas Komunikasi dan Informatika.

Realisasi anggaran program dan kegiatan Tahun 2026 TW II, dapat dilihat pada tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2026

Tabel. 2.1.1. Realisasi Anggaran s/d Triwulan II

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**3.697.518.060,00**	**1.664.287.900,00**	**45,01%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah**	**13.692.400,00**	**9.330.278,00**	**68.14%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.456.900,00	8.620.100,00	75.24%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.235.500,00	710.178,00	31.77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah**	**2.895.714.440,00**	**1.264.613.599,00**	**43.67%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.833.150.240,00	1.238.615.799,00	43.72%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.564.200,00	25.997.800,00	41.55%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**9.316.000,00**	**4.392.000,00**	**47.14%**
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9.316.000,00	4.392.000,00	47.14%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16.617.200,00	9.678.400,00	58.24%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4.659.000,00	825.000,00	17.71%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	499.980,00	0	0%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.650.000,00	14.047.000,00	75.32%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	***75.902.000,00***	***75.591.000,00***	***99.59%***
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50.152.000,00	50.061.000,00	99.82%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25.750.000,00	25.530.000,00	99.15%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	**641.228.040,00**	**278.013.693,00**	**43.36%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	121.800.240,00	44.213.552,00	36.3%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	519.427.800,00	233.800.141,00	45.01%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**21.239.000,00**	**7.796.930,00**	**36.71%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8.700.000,00	5.229.500,00	60.11%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.640.000,00	2.567.430,00	97.25%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp	%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9.899.000,00	0	0%
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	**804.899.980,00**	**449.155.900,00**	**55.8%**
	Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten			
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah informasi publik yang dipublikasikan**	**804.899.980,00**	**449.155.900,00**	**55.8%**
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	328.800.000,00	103.236.000,00	31.4%
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	129.288.780,00	123.989.400,00	95.9%
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	250.000.000,00	173.390.500,00	69.36%
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	96.811.200,00	48.540.000,00	50.14%
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah**	**1.180.499.240,00**	**727.319.530,00**	**61.61%**
	Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi			
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Layanan Pemerintah yang terhubung dengan baik**	**70.500.000,00**	**45.998.400,00**	**65.25%**
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	70.500.000,00	45.998.400,00	65.25%
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik**	**1.109.999.240,00**	**681.321.130,00**	**61.38%**
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	79.592.000,00	19.772.620,00	24.84%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
		Rp	Rp	%
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	821.303.240,00	452.460.030,00	55.09%
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	209.104.000,00	209.088.480,00	99.99%
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik**	**75.000.000,00**	**43.094.195,00**	**57.46%**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data statistik sektoral yang terkelola pada portal data pada kabupaten Pacitan**	**75.000.000,00**	**43.094.195,00**	**57.46%**
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	75.000.000,00	43.094.195,00	57.46%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**5.000.000,00**	**2.907.455,00**	**58.15%**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan digital yang diamankan**	**5.000.000,00**	**2.907.455,00**	**58.15%**
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	5.000.000,00	2.907.455,00	58.15%
TOTAL		**5.762.917.280,00**	**2.886.764.980,00**	**50.09%**

Pada Tahun Anggaran 2026 TW II, total alokasi anggaran untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 5.762.917.280,-, dengan realisasi sampai dengan triwulan II mencapai Rp. 2.886.764.980,- atau sekitar 50,09 % dari total anggaran. Hal ini menunjukkan tingkat realisasi capaian anggaran sedang, capaian ini juga mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran program dan kegiatan yang direncanakan telah terealisasi sesuai dengan target yang direncanakan.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 sampai dengan triwulan II ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.1.2. dibawah ini :

Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Pacitan Triwulan Tahun 2026

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target RPJMD pada Tahun 2026 (Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d RKPD Tahun Lalu (2025)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2026) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (Tahun 2026)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d Tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2026 (%)
						I	II	III	IV				
			K	K	K	K	K	K	K	K	K	K	K
(3)	(4)		(6)	(8)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=(8+9+10+11))	(13 = (12/7x100))	(14 = (8+12))	(15 = (14/6x100))
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	71,30	70,90	71.30	0,00	75,74	0,00	0,00	75,74	106,23	75,74	0,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dok	10	23	10.00	6,00	2,00	0,00	0,00	8,00	80,00	8,00	0,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok		0.00	6.00	6,00	2,00	0,00	0,00	8,00	133,33	8,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	Lap		0.00	3.00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	66,67	2,00	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Lap	56	56	56.00	10,00	9,00	0,00	0,00	19,00	33,93	19,00	0,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		0.00	27.00	23,00	27,00	0,00	0,00	27,00	100,00	27,00	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Dok		0.00	36.00	9,00	9,00	0,00	0,00	18,00	50,00	18,00	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100	100	100.00	10,00	30,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok		0.00	20.00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00	2,00	0

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuh**	%	100	**100**	**100.00**	**10,00**	**30,00**	0,00	0,00	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		0.00	7.00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	28,57	2,00	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		0.00	4.00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		0.00	5.00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap		0.00	12.00	3,00	2,00	0,00	0,00	5,00	41,67	5,00	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	%	100	**100**	**100.00**	**10,00**	**70,00**	0,00	0,00	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**0,00**
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Unit		0.00	10.00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	10,00	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		0.00	5.00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	40,00	2,00	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan**	%	100	**100**	**100.00**	**10,00**	**30,00**	0,00	0,00	**40,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap		0.00	12.00	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap		0.00	12.00	3,00	3,00	0,00	0,00	6,00	50,00	6,00	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	%	80	**80**	**80.00**	**48,00**	**24,00**	0,00	0,00	**72,00**	**90,00**	**72,00**	**0,00**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		0.00	17.00	2,00	1,00	0,00	0,00	3,00	17,65	3,00	0
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit		0.00	22.00	15,00	6,00	0,00	0,00	21,00	95,45	21,00	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0.00	3.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten**	**%**	**90,88**	**90,88**	**100.00**	**32,00**	**22,00**	**0,00**	**0,00**	**54,00**	**54,00**	**54,00**	**0,00**
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah informasi publik yang dipublikasikan**	**Informasi**		**0.00**	**1600.00**	**545,00**	**791,00**	**0,00**	**0,00**	**1.336,00**	**83,50**	**1.336,00**	**0**
Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi	Lap		0.00	4.00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25,00	1,00	0
Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	%		0.00	100.00	13,00	15,00	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	0
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai	Media	0.00	0.00	63.00	65,00	65,00	0,00	0,00	65,00	103,17	65,00	0
Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten		0.00	1600.00	545,00	791,00	0,00	0,00	1.336,00	83,50	1.336,00	0
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	**Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi**	**%**	**0,00**	**0.00**	**25.00**	**6,25**	**6,25**	**0,00**	**0,00**	**12,50**	**50,00**	**12,50**	**0,00**
	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah	**%**	**0,00**	**0.00**	**58.97**	**61,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61,54**	**104,36**	**61,54**	**0**
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sistem Layanan Pemerintah yang terhubung dengan baik**	**Layanan**		**0.00**	**4.00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**50,00**	**2,00**	**0**
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dok		0.00	4.00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	50,00	2,00	0

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik**	**PD**		**0.00**	**23.00**	**23,00**	**0,00**	0,00	0,00	**23,00**	**100,00**	**23,00**	**0**
Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dok		0.00	1.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	PD		0.00	23.00	23,00	0,00	0,00	0,00	23,00	100,00	23,00	0
Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi		0.00	5.00	1,00	2,00	0,00	0,00	3,00	60,00	3,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik**	**%**	**0,00**	**0.00**	**100.00**	**0,00**	**74,00**	0,00	0,00	**74,00**	**74,00**	**74,00**	**0**
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah data statistik sektoral yang terkelola pada portal data pada kabupaten Pacitan**	**Data**		**0.00**	**666.00**	**634,00**	**647,00**	0,00	0,00	**647,00**	**97,15**	**647,00**	**0**
Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%	0.00	0.00	100.00	0,00	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	74,00	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**Angka**	**81,00**	**0.00**	**236.00**	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah layanan digital yang diamankan**	**Layanan**		**0.00**	**5.00**	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	**2,00**	**40,00**	**2,00**	**0**
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	PD		0.00	3.00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33	1,00	0

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

   Pada program penunjang dengan indikator nilai Sakip perangkat daerah sampai dengan triwulan II mendapat nilai 75,74 .Program penunjang ini terdapat 7 kegiatan dengan 16 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 3.697.518.060,00. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 1.664.287.900,- (45,01%) dengan rincian sebagai berikut :

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 13.692.400,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan Rp. 9.330.278,- (68.14%) dengan jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja PD yang tersusun sebanyak 9 dokumen terealisasi 8 dokumen yaitu Renja, DPA Induk, RKA Induk, Laporan Monitoring Evaluasi triwulan 1 dan 2, Dok.PK, Lap.SPIP
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 2.895.714.440,-, sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 1.264.613.599,-(43.67%) dengan jumlah dokumen laporan keuangan PD yang tersusun sebanyak 19 dokumen yaitu laporan bulanan keuangan, laporan triwulan keuangan dan laporan semesteran keuangan.
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terdapat 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 9.316.000,-, sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 4.392.000,- (47.14%) dengan indicator prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian sebesar 40 %. Dari sub kegiatan ini digunakan memenuhi layanan kepegawaian sejumlah 45 pegawai dan 6 jasa teknis (Odsorsing).
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah terdapat 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 40.423.180,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 12.357.000,,- (60,73%) dengan prosentase operasional dasar PD yang terpenuhi sebesar 40%.Dari capaian tersebut digunakan untuk penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistic kantor, penyediaan

barang cetakan dan penggandaan serta biaya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu induk sebesar Rp. 75.902.000,- terealisasi sebesar Rp. 75.591.000,- (99,59%) dengan prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terealisasi sebesar 80 %.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.641.228.040,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 134.673.936,- (40.00%) dengan prosentase penyediaan jasa penunjang operasional PD yang dibutuhkan sebesar 40%, yang digunakan untuk pembayaran Listrik,telpon serta pembayaran honor tenaga teknis.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.239.000,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 7.796.930,- (36,71%) dengan prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik sebesar 72%. Pada sub kegiatan pemeliharaan ini digunakan untuk pembayaran pajak pada kendaraan dinas, dan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin kantor serta pemeliharaan gedung kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Pacitan

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, dengan 1 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp 804.899.980,- .Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 449.155.900,- (55,80%). Indikator kinerja pada program ini adalah persentase masyarakat yang terpapar informasi mengenai Program dan kebijakan pemerintah Kabupaten dari target 100 % terealisasi 54 %. Dengan rincian sebagai berikut:

   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 4 sub kegiatan. Capaian kinerja untuk indikator kegiatan ini terdapat 1 indikator yaitu jumlah informasi yang dipublikasikan dengan target 1600 informasi terealisasi 1.336. Anggaran

untuk kegiatan ini digunakan untuk pembayaran honorarium wartawan, Kerjasama dengan awak media, penyebaran informasi, pengelolaan media komunikasi public serta penyusunan konten.

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, ada 2 kegiatan dengan 4 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.180.499.240,- . Dengan indikator 1.Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi dengan target 25 % terealisasi 12,16 % 2.Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah dengan target 58,97 % terealisasi 61,54%. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 727.319.530,- (61,,61%) dan realisasi kinerja sebesar 50,00%. Dengan kegiatan sebagai berikut:
    a. Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan. Pagu anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 70.500.000,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 45.998.400,- (65,25%) dengan jumlah sistem layanan pemerintah yang terhubung dengan baik dengan target 4 layanan dan terealisasi 2 layanan yaitu simpeg dan sitaru.
    b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan 3 sub kegiatan dan pagu anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.109.999.240,- sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 681.321.130,,-(61,38%) dengan indikator jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik dengan target 23 OPD terealisasi 23 OPD.
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, dengan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kinerja dengan pagu anggaran program sebesar Rp. 75.000.000,- dengan indikator kinerja adalah prosentase kegiatan statistic sectoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pembina data dengan target 100 %. Sampai dengan triwulan II realisasi fisik keuangan sebesar Rp. 43.094.195,- (57,46%), dan realisasi capaian kinerja 74 %. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan 1 sub kegiatan. Dengan indikator kegiatan adalah

jumlah data statistic sectoral yang terkelola pada portal data pada Kab. Pacitan dengan target 666 data terealisasi 647 data.

5. Program Penyelenggaran Persandian untuk Pengamanan Informasi, indikator Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dengan target nilai sebesar 238.Anggaran yang dikelola sebesar Rp. 5.000.000,- Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota indkator jumlah layanan digital yang diamankan 5 layanan terealisasi 2 layanan yaitu penanganan insiden siber dan penanganan penerbitan sertifikat elektronik . Layanan Perangkat daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi dan persandian ada 1 OPD

Dari uraian diatas bahwa capaian anggaran sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 2.886.764.980,- (50,09%) dengan predikat rendah. Untuk itu perlu dilakukan langkah – langkah agar target yang telah ditetapkan dari masing – masing program dapat tercapai, yaitu :

- Mengadakan evaluasi internal untuk mengetahui permasalahan dan melihat program dan kegiatan mana saja yang capaiannya belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga diperlukan perhatian khusus guna menjamin keberhasilan realisasi program kegiatan tersebut;
- Melakukan koordinasi dengan para stakeholder, terkait dengan program kegiatan yang perlu terlaksana untuk memastikan program kegiatan tersebut nantinya dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya;Melakukan perencanaan ulang bagi program kegiatan yang belum terlaksana (baik yang dijadwalkan pada triwulan I dan II, mau pun yang akan dilaksanakan pada triwulan III dan IV), khususnya terkait dengan penganggaran pada anggaran perubahan tahun ini.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selain didasarkan pada rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah,oleh karena itu tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026.

3.1.1 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan pada Tahun 2026 adalah ***"Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian "*** dengan indikator tujuan adalah : *Nilai Indeks SPBE.*

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan ada 4 yaitu :

1. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan, dengan indikator Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
2. Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik, dengan indikator Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik;
3. Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah, dengan indikator Indeks Pembanguan Statistik (IPS);
4. Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi, dengan indikator Indeks Keamanan (KAMI);
5. Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah, dengan indikator Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini,

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Formulasi	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital melalui penguatan statistik sektoral dan persandian	Nilai Indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain $$\textit{Indeks SPBE} = \sum_{j=n}^{n} ND_j \, x \, BD_j$$ Dimana : NDj adalah nilai indeks domain ke-j; BDj adalah nilai bobot domain ke-j.	3,8	1,51 - 1,61*	1,61 - 1,75*	1,71 - 1,9*	1,81 - 2,04*	1,91 - 2,19*
Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP) untuk mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan	Penilaian Informasi Pubik, Dinilai dari serangkaian tahapan : 1. Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (SAQ). (30%) 2. Verifikasi dan Uji Publik. (30%) 3. Visitasi (Kunjungan Lapangan) dan Verifikasi Faktual. (40%) $$N = \sum x_i + y_i + z_i$$ Dimana : N : Total Nilai Keterbukaan Informasi publik (KIP)	90	94	96	98	98	99

		$\sum x_i$: Jumlah total skor Pengisian Kuesioner Penilaian Mandiri (SAQ) (berdasarkan bobot masing-masing indikator) y_i : Verifikasi dan Uji Publik y_i : Visitasi (Kunjungan Lapangan) dan Verifikasi Faktual * Komposisi berbeda setiap tahunnya						
Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik Adalah sistem klasifikasi lima tingkat yang mengukur kematangan penerapan SPBE, mulai dari Tingkat 1 (Informasi), di mana layanan diberikan secara satu arah, hingga Tingkat 5 (Optimalisasi), di mana layanan beradaptasi	Proses evaluasi ini dilakukan melalui 1.Penilaian mandiri. 2.Dokumen. 3.Wawancara. 4.Visitasi untuk mengukur kapabilitas proses dan fungsi teknis SPBE .	4	4,17	4,33	4,5	4,6	4,8
Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembanguan Statistik (IPS)	Dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. $Indeks\ Pembangunan\ Statistik = \sum_{k=1}^{K} Bobot\ Domain_k \times Nilai\ Domain_k$	2,37	2,42	2,47	2,52	2,57	2,62

		dengan: K adalah Banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;						
Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI) adalah alat bantu untuk mengevaluasi dan menganalisis tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di suatu organisasi.	Indeks ini berpedoman pada standar SNI ISO/IEC 27001 dan mengukur kesiapan keamanan. Penilaian berdasarkan : 1. Tata kelola, 2. Pengelolaan risiko, 3. Kerangka kerja, 4. Pengelolaan aset, 5. Teknologi informasi, serta Aspek suplemen seperti keamanan pihak ketiga dan perlindungan data pribadi. $\frac{Nilai\ Indeks\ Keamanan\ Informasi\ (KAMI)\ Hasil\ Verifikasi}{Nilai\ Optimal\ Indeks\ Keamanan\ (KAMI)(918)} x\ 100\%$	27,13	36,28	36,43	36,59	36,74	36,90
Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo dengan perhitungan : $SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	90	90,4	90,8	91,2	91,6	92

3.1.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sedangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	94	Bidang Informasi dan Komunikasi
2.	Meningkatnya Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik	Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik	4,17	Bidang TI dan Persandian
3.	Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah	Indeks Pembanguan Statistik (IPS)	2,42	Bidang Statistik
4.	Meningkatnya Tata Kelola Keamanan Informasi	Indeks Keamanan (KAMI)	36,28	Bidang TI dan Persandian
5.	Meningkatnya kualitas layanan tata kelola Pemerintah Daerah	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90,4	Sekretariat

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Rencana kerja dan pendanaan pada perubahan rencana kerja Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) tahun 2026 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II dengan melakukan penyusunan target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) yang didasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi, terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya visi dan misi serta tujuan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025 – 2029.

Uraian Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disajikan pada bab ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Pacitan tahun 2026. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan tahun 2026 direncanakan antara lain untuk penyesuaian gaji ASN,pengadaan CCTV pengadaan firewall, penambahan pada sumber dana DBHCHT untuk Sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik, fasilitasi wartawan. Secara rincian perubahan target kinerja dan pengangaran dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika KabupatenPacitan dapat dilihat pada Tabel 4.1. sebagai berikut:

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. PACITAN
TAHUN 2026

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
			TARGET 2026		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2026	APBD 2026	RKPD PERUBAHAN 2026					
1	3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	19	20
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**7.165.496.890,00**	**5.762.917.280,00**	**5.810.916.125,00**	**-1.354.580.765,00**				**5.932.725.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				**7.165.496.890,00**	**5.762.917.280,00**	**5.810.916.125,00**	**-1.354.580.765,00**				**5.932.725.000,00**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**6.946.233.899,00**	**5.682.917.280,00**	**5.732.547.125,00**	**-1.213.686.774,00**				**5.257.725.000,00**
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Hasil nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah**	-	**71,30 %**	**4.069.563.269,00**	**3.697.518.060,00**	**3.518.845.365,00**	**-2.576.838.269,00**				**1.492.725.000,00**
	[Meningkatnya tata dan kelola perangkat daerah]	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	-	-	**4.069.563.269,00**	**3.697.518.060,00**	**3.518.845.365,00**	-	-	-	**72.70**	**1.492.725.000,00**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah***	-	**10 Dokumen**	**51.500.300,00**	**13.692.400,00**	**24.492.400,00**	**-27.007.900,00**				**0,00**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	9 Dokumen	35.806.000,00	11.456.900,00	19.256.900,00	-16.549.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD											
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	1 Laporan	15.694.300,00	2.235.500,00	5.235.500,00	-10.458.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	***Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah***	-	**56 Dokumen**	**2.911.236.160,00**	**2.695.714.440,00**	**2.671.168.649,00**	**-240.068.511,00**				**7.725.000,00**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	2.845.596.960,00	2.833.150.240,00	2.605.602.449,00	-239.994.511,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	9.736.200,00	0,00	0,00	-9.736.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7.725.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD											
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	57 Laporan	57 Laporan	55.902.000,00	62.564.200,00	65.564.200,00	9.662.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	***Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian***	-	**100 %**	**124.348.000,00**	**9.316.000,00**	**12.316.000,00**	**-112.032.000,00**				**300.000.000,00**
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya											
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	16.068.000,00	0,00	0,00	-16.068.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai											
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27 Dokumen	27 Dokumen	108.280.000,00	9.316.000,00	12.316.000,00	-95.964.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		250.000.000,00

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	***Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi***	-	**100 %**	**225.436.369,00**	**40.428.180,00**	**61.537.176,00**	**-163.899.193,00**				**340.000.000,00**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor											
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	57.975.700,00	16.617.200,00	23.512.600,00	-34.463.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		70.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	39.875.000,00	4.659.000,00	11.034.500,00	-28.840.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan											
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	27.775.669,00	499.980,00	10.696.076,00	-17.079.593,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD											
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	99.810.000,00	18.650.000,00	16.294.000,00	-83.516.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	***Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan***	-	**100 %**	**50.686.400,00**	**75.902.000,00**	**75.902.000,00**	**25.215.600,00**				**60.000.000,00**
	Pengadaan Mebel											
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	12.266.200,00	50.152.000,00	50.152.000,00	37.885.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		10.000.000,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit	38.420.200,00	25.750.000,00	25.750.000,00	-12.670.200,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		50.000.000,00

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan***	-	**100 %**	**595.327.040,00**	**641.228.040,00**	**599.600.640,00**	**4.273.600,00**				**650.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	115.799.240,00	121.800.240,00	91.500.240,00	-24.299.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		150.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor											
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	479.527.800,00	519.427.800,00	508.100.400,00	28.572.600,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	***Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik***	-	**80 %**	**111.030.000,00**	**21.239.000,00**	**73.830.500,00**	**-37.199.500,00**				**135.000.000,00**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan											
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	10 Unit	46.050.000,00	8.700.000,00	37.655.500,00	-8.394.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya											
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	12 Unit	12.880.000,00	2.640.000,00	7.520.000,00	-5.360.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		15.000.000,00
	-	-	-	-	**4.069.563.269,00**	**3.697.518.060,00**	**3.518.845.365,00**	-	-	-	-	**1.492.725.000,00**
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya											
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	52.100.000,00	9.899.000,00	28.655.000,00	-23.445.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60.000.000,00

2,	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Prosentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	-	**100 100 % Prosentas e**	**1.207.671.232,00**	**804.899.980,00**	**960.248.520,00**	**367.328.768,00**				**1.565.000.000,00**
	[Meningkatnya Layanan aduan masyarakat yang terintegrasi dan sesuai SOP]	**Prosentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti**	-	-	**1.207.671.232,00**	**804.899.980,00**	**960.248.520,00**	-	-	-	**100**	**1.565.000.000,00**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah informasi publik yang dipublikasikan***	-	**1600 Informasi**	**1.207.671.232,00**	**804.899.980,00**	**960.248.520,00**	**-247.422.712,00**				**1.565.000.000,00**
	Relasi Media											
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	2 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	328.800.000,00	316.200.000,00	16.200.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00
	Pelayanan Informasi Publik											
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	25 Permohonan	25 Permohonan	51.506.232,00	0,00	0,00	-51.506.232,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		35.000.000,00
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik											
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	50.220.000,00	0,00	25.974.900,00	-24.245.100,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		30.000.000,00

	[Meningkatnya penyebarluasan informasi Masyarakat yang mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Kabupaten]	**Persentase Masyarakat Yang Terpapar Informasi Mengenai Program dan Kebijakan Pemerintah Kabupaten**	-	-	1.207.671.232,00	804.889.980,00	980.248.620,00	-	-	-	100	1.566.000.000,00
	Diseminasi Informasi											
		Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	55 Persentase	55 Persentase	201.945.000,00	129.288.780,00	144.453.420,00	-57.491.580,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		500.000.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik											
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	36 Media	36 Media	400.000.000,00	250.000.000,00	355.349.000,00	-44.651.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)		400.000.000,00
	Penyusunan Konten											
		Jumlah Konten Informasi Publik	100 Konten	100 Konten	204.000.000,00	98.811.200,00	118.271.200,00	-85.728.800,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		300.000.000,00
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi**	-	**25 %**	**1.668.999.398,00**	**1.180.499.240,00**	**1.263.463.240,00**	**631.000.602,00**				**2.200.000.000,00**
	[Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan]	**Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi**	-	-	**1.668.999.398,00**	**1.180.499.240,00**	**1.263.463.240,00**	-	-	-	**25**	**2.200.000.000,00**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah Sistem Layanan Pemerintah yang terhubung dengan baik***	-	**4 Layanan**	**70.500.000,00**	**70.500.000,00**	**80.500.000,00**	**10.000.000,00**				**100.000.000,00**
	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa											
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	3 Dokumen	3 Dokumen	70.500.000,00	70.500.000,00	80.500.000,00	10.000.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100.000.000,00

	[Meningkatnya Pembangunan Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah]	**Persentase perangkat daerah yang terkoneksi dalam Jaringan Intra Pemerintah**	-	-	**1.668.999.398,00**	**1.180.499.240,00**	**1.253.453.240,00**	-	-	-	**58,97**	**2.200.000.000,00**
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah jaringan intra yang terpasang dan berfungsi dengan baik*	-	23 OPD	1.598.499.398,00	1.109.999.240,00	1.172.853.240,00	-425.546.158,00				2.100.000.000,00
	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE											
		Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	2 Dokumen	2 Dokumen	181.060.000,00	79.592.000,00	48.905.500,00	-132.154.500,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400.000.000,00
	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota											
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 0	0 0	1.055.214.398,00	821.303.240,00	914.943.740,00	-140.270.658,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1.500.000.000,00
	[Meningkatnya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan]	**Prosentase Layanan Digital Pemerintah yang Terintegrasi**	-	-	**1.668.999.398,00**	**1.180.499.240,00**	**1.253.453.240,00**	-	-	-	**25**	**2.200.000.000,00**
	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE											
		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	2 Aplikasi	2 Aplikasi	362.225.000,00	209.104.000,00	209.104.000,00	-153.121.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200.000.000,00

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				**211.320.991,00**	**75.000.000,00**	**73.779.000,00**	**-137.541.991,00**				**650.000.000,00**
1,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik**	**-**	**100 %**	**211.320.991,00**	**75.000.000,00**	**73.779.000,00**	**438.679.009,00**				**650.000.000,00**
	[Meningkatnya Kualitas data Statistik Sektoral Daerah]	**Prosentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik**	-	-	**211.320.991,00**	**75.000.000,00**	**73.779.000,00**	-	-	-	**22.20**	**650.000.000,00**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah data statistik sektoral yang terkelola pada portal data pada kabupaten Pacitan***	**-**	**666 Data**	**211.320.991,00**	**75.000.000,00**	**73.779.000,00**	**-137.541.991,00**				**650.000.000,00**
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional											
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	90 %	100.000.000,00	75.000.000,00	73.779.000,00	-26.221.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		300.000.000,00
	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia											
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	90 %	90 %	111.320.991,00	0,00	0,00	-111.320.991,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		350.000.000,00
	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral											
		Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	12 Laporan	12 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		0,00

	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				**7.942.000,00**	**5.000.000,00**	**4.590.000,00**	**-3.352.000,00**				**25.000.000,00**
1,	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**-**	**236 Angka**	**7.942.000,00**	**5.000.000,00**	**4.590.000,00**	**17.058.000,00**				**25.000.000,00**
	[Meningkatnya keamanan informasi]	**Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**	**-**	**-**	**7.942.000,00**	**5.000.000,00**	**4.590.000,00**	**-**	**-**	**-**	**36.28**	**25.000.000,00**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	***Jumlah layanan digital yang diamankan*** ***Jumlah SDM bidang TI dan Persandian yang mendapatkan pelatihan***	**-**	**1 Orang 3 Layanan**	**7.942.000,00**	**5.000.000,00**	**4.590.000,00**	**-3.352.000,00**				**25.000.000,00**
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah											
		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	3 Perangkat Daerah	3 Perangkat Daerah	7.942.000,00	5.000.000,00	4.590.000,00	-3.352.000,00	Kab. Pacitan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		25.000.000,00
					7.165.496.890,00	**5.762.917.280,00**	**5.810.916.125,00**	**-51.485.437.229,19**				**5.932.725.000,00**

BAB IV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Melalui Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Dalam implementasi dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026, diperlukan konsistensi dan komitmen OPD dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga tercapai sinkronisasi dan sinergitas guna mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Pacitan terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 **"PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA"**.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan membutuhkan kritik, saran untuk dapat membantu penyempurnaannya di masa mendatang. Diharapkan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan Tahun 2026 ini dapat di laksanakan sebaik– baiknya dan pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik serta berguna untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PACITAN

DODIK SOEMARSONO, AP.M, Sc
Pembina Utama Muda
NIP. 197610151996021002